

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

1. Bahaya Korupsi dalam Perikehidupan Berbangsa dan Bernegara

Korupsi merupakan tantangan serius dalam pembangunan bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam bidang politik, korupsi dapat menciderai nilai-nilai demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) karena mengabaikan kaidah-kaidah proses formal, seperti mengikuti berbagai prosedur dan tata cara yang harus dilalui untuk melakukan kegiatan. Pengabaian proses formal dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menurunkan tingkat partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi dalam bidang hukum akan melahirkan dan menyuburkan mafia peradilan, mereduksi bahkan yang lebih parah akan menghilangkan rasa keadilan dan ketertiban umum. Pada bidang ekonomi, korupsi akan mempersulit pertumbuhan dan terjadi inefisiensi atau biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*). Pelaku bisnis akan mengeluarkan biaya tambahan di luar ongkos proses produksi, namun harus tetap diperhitungkan yang akan dibebankan kepada konsumen. Implikasinya, akan “memperlemah roda perekonomian, menghambat pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi suatu negara” (Rachman, 2010:2), serta daya saing produk di pasar lokal, nasional, maupun global.

Pandangan di atas sejalan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada bagian menimbang bahwa (1) korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945; dan (2) menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Pada sisi sosial dan budaya, korupsi akan melemahkan kontrol sosial dan meningkatnya rasa permisif masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi karena dianggap sebagai suatu yang biasa dan menjadi bagian hidup, tumbuh, serta berkembang dalam kebudayaan. Kontrol sosial itu dapat berupa “mekanisme masyarakat dalam mengapresiasi prestasi yang dicapai sekaligus memberi sanksi sosial yang berat bagi anggota masyarakat yang berperilaku amoral” (Ibrahim dan Rukmana, 2009:836), termasuk di dalamnya perilaku korupsi. Pandangan bahwa sukses duniawi diukur dari tingkat kekayaan yang dimiliki memberikan kontribusi signifikan bagi perilaku korupsi karena orang akan mengejar harta benda tanpa memperdulikan lagi bahwa cara yang ditempuh telah melanggar kaidah-kaidah hukum. Implikasinya akan menyuburkan sistem sosial yang membuka peluang bagi praktik korupsi seperti *extended-family*, yang tumbuh dari kehidupan masyarakat paguyuban. Seseorang yang sukses berkarir dalam suatu keluarga memiliki kewajiban psikologis membawa anggota keluarga yang lain untuk sukses atau setidaknya memberikan peluang menikmati sukses yang dicapai (Asy'arie, 2003; Piliang, 2009). Acapkali untuk memenuhi kewajiban psikologis tersebut jalan yang ditempuh masuk dalam kategori korupsi.

Kondisi yang lebih memprihatinkan, korupsi telah merambah dunia pendidikan. Dalam pandangan Darmawan (2009) terdapat sejumlah persoalan menyangkut dampak korupsi di dunia pendidikan. *Pertama*, merosotnya kualitas pendidikan. Korupsi mengakibatkan rendahnya kualitas sarana, prasarana, media

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan, mutu pendidik, dan lulusan. Rendahnya kualitas proses dan lulusan lembaga pendidikan dalam negara dapat menyebabkan generasi muda mencari peluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik di negara lain. Implikasi lanjutan terjadi *capitalflight* ke mancanegara. *Kedua*, terjadi ketimpangan sosial, korupsi dalam bidang pendidikan meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang miskin dan marginal untuk dapat mengenyam pendidikan secara memadai dan berkeadilan serta lemahnya angkatan kerja terdidik. Akibat lain akan melahirkan generasi-generasi yang korup. Generasi yang korup melahirkan pendidikan dan pemerintah yang korup pula. *Ketiga*, tercerabutnya moralitas akhlak mulia dan mengubah persepsi publik. Kejujuran semakin sulit ditemukan dan dihargai. Sebaliknya orang-orang jujur tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya dalam dunia pendidikan. Kasus nilai Ujian Nasional (UN) hasil menyontek lebih dihargai daripada nilai hasil kejujuran. Hal yang sama disampaikan Bardhan dan Heyneman bahwa:

Corruption can be efficiency-improving in instances in which prices (tuition, fees, wages) are distorted by regulation or lags in application. However the social benefits from corruption are less likely to be observed in education because corruption affects all the other social goals for making the education investment (Bardhan (1997:3). As a term, corruption is used because of the public good nature of education and education's role in affecting social cohesion. Because education serves as a way of modeling good behavior for children or young adults, allowing an education system to become corrupt may be more costly than allowing corruption in the customs service or the policy. By design, one function of education is to purposefully teach the young how to behave in the future. If the education system is corrupt, one can expect future citizens to be corrupt as well. This clearly must have a cost (Heyneman, 2002:3).

Berbagai akibat korupsi yang telah dijelaskan di atas sebenarnya yang akan menanggung akibat secara langsung maupun tidak langsung adalah rakyat dalam berbagai bidang aktivitas. Paparan yang hampir sama disampaikan oleh

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Darmawan, dkk (2008) bahwa di sebuah negara maju, korupsi dapat berlangsung dalam sebuah komponen tunggal dari lembaga politik. Sementara di negara-negara berkembang memiliki lembaga-lembaga administrasi dan politik yang lemah, korupsi dapat menjadi bagian dari sistem. Pandangan ini menunjukkan bahwa di negara berkembang termasuk Indonesia korupsi menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan, yang dapat diibaratkan sebagai urat nadi dalam sistem peredaran darah manusia atau menjadi patologi sosial. Pendek kata, di mana saja selama ada peluang dan kesempatan, maka di situ bisa terjadi tindakan korupsi. Dimana terdapat pelayanan publik, di sana sangat rawan terjadi “penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) yang mengarah kepada tindakan koruptif. Ini tidak lain menyangkut persoalan mentalitas masyarakat yang memang masih permisif terhadap tindakan penyelewengan” (Syam, 2009:1). Sebaik apapun peraturan tentang korupsi dan Prosedur Operasional Standar (POS) layanan publik, jika tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas mental manusia, peluang untuk melakukan korupsi tetap akan terbuka karena pertahanan terakhir terletak kepada kemauan manusia untuk tidak memanfaatkan peluang yang ada meskipun hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

2. Permasalahan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi, mulai dari pembuatan berbagai peraturan perundangan-undangan, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk memberikan efek jera, dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Keluarnya Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o.

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cukup untuk dijadikan dasar penegak hukum dalam mengadili kasus korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan KPK dalam memberantas korupsi patut mendapatkan apresiasi, namun masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Indikator yang nampak semakin meningkat jumlah pelaku korupsi maupun kerugian negara, baik yang dilakukan oleh pejabat sipil, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) maupun pelaku usaha di sektor swasta. Berdasarkan hasil rilis *Transparency International* (TI) menunjukkan pada tahun 1995-2005 posisi Indonesia berada pada kisaran lima besar negara terkorup di dunia (TII, 2006). Menurut survei yang dilakukan oleh *Pacific Economic and Risk Consultancy* (PERC) sebagaimana dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia.

Besarnya *Corruption Perception Indeks* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) disampaikan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) yang melibatkan 180 negara, selama kurun waktu tahun 2006-2011 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 IPK Indonesia dalam Kurun Waktu Tahun 2006-2011

No	Tahun	IPK	Sumber
1	2006	2,4	KPK (2006)
2	2007	2,3	TII (2007)
3	2008	2,6	TII (2008)
4	2009	2,8	TII (2009)
5	2010	2,8	TII (2010)
6	2011	3,0	TII (2011)

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Skor IPK 2,4 pada tahun 2006, Indonesia masuk daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama 71 negara dengan skor di bawah tiga. Pada tahun 2008, IPK menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berada di urutan ke-126 dengan skor 2,6. Tahun 2009 Skor IPK adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analisis negara. Skor Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik masih harus ditingkatkan. Rentang IPK 2,4-3,0 masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3). Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara dengan indeks yang tinggi antara lain Selandia Baru (9,4), Denmark (9,3), Singapura dan Swedia sama-sama berindeks (9,2), dan Swiss (9,0) adalah negara-negara dengan tingkat stabilitas ekonomi dan politik yang tinggi. Pada tahun 2010, IPK tetap pada skor 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009 (TII, 2010). Artinya, tak ada kemajuan, jalan di tempat, dan stagnan. Baru pada tahun 2011 IPK Indonesia naik menjadi 3,00.

Kenaikan skor IPK Indonesia yang dikeluarkan TII menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi semakin kuat, antara lain tetap eksisnya peran KPK dalam memberantas korupsi. Selain Indonesia, skor sebesar 3.0 pada tahun 2011 juga diperoleh 11 negara lain seperti Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome dan Principe, Suriname, Tanzania. Indonesia dan ke-11 negara tersebut menempati posisi 100 dari 183

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara yang diukur. Di kawasan ASEAN, skor IPK Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand (TII, 2011).

Perubahan skor IPK terjadi karena adanya perbaikan atau perubahan yang terobservasi dengan jelas terkait prestasi KPK dan reformasi Kementerian Keuangan. Perubahan di dua institusi itu secara signifikan mempengaruhi IPK Indonesia. Usaha yang telah dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi relatif baik dan konsisten dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain di Indonesia. Reformasi di Kementerian Keuangan dirasakan langsung oleh rakyat dan pelaku bisnis, terutama bidang pajak, dan bea cukai. Namun, prestasi itu belum diikuti perubahan signifikan di institusi publik lain, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan instansi lain yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Data di atas menunjukkan bahwa aspek pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum masih dirasa belum cukup, tetapi harus diimbangi dengan semangat, atmosfer, dan budaya antikorupsi. Semangat, atmosfer, dan budaya antikorupsi yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Hal ini karena salah satu fungsi pendidikan adalah untuk melakukan koreksi budaya (Eby, 1952, dalam Darmawan, dkk, 2008; Hassan, 2004; Muhari, 2004; Zuriah, 2008), yaitu koreksi terhadap budaya yang tidak baik atau kontraproduktif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Termasuk didalamnya mereduksi sikap dan perilaku korupsi dan menebalkan semangat antikorupsi khususnya kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa.

3. Tantangan Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PKn

Masyarakat Indonesia yang agamis tentu bisa memahami tentang pentingnya tindakan pemberantasan korupsi, yang berarti bahwa para pemimpin

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

agama bersama-sama dengan pemerintah melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap tindakan korupsi. Hal ini didasarkan realitas bahwa tindakan korupsi masih menggejala di seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu maka tantangan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi ke depan dengan melakukan tindakan pencegahan korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang terstruktur dan terencana dalam keseluruhan masyarakat. Pemerintah tentu tidak bisa melakukan sendiri, gerakan pencegahan korupsi perlu melibatkan seluruh elemen institusi sosial kemasyarakatan, termasuk melalui pendidikan formal (sekolah). Hal ini sesuai dengan pandangan yang dipaparkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* bahwa

Educate the younger generations towards a responsible citizenry: sensitizing future generations to key principles of democratic governance and the negative consequences of corrupt behaviour. It is also important to instil in young people a culture of positive engagement and respect and skills for constructive and investigative debate on the quality of governance and its impact on people's lives ... (UNDP, 2004: 11)

Rencana KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan PAK ke kurikulum sekolah perlu direalisasikan dalam program yang lebih konkrit, terpadu, dan berkesinambungan. Demikian pula “kerjasama antar institusi sosial dan keagamaan perlu dilakukan melalui implementasi yang lebih jelas dan nyata” (Syam, 2010:2). Isu antikorupsi yang semakin kencang disuarakan berbagai elemen masyarakat, menggambarkan bahwa pemberantasan korupsi melalui penyadaran publik sangat diperlukan disamping penegakkan hukum. Dalam konteks penyadaran publik, lembaga pendidikan formal (sekolah) mempunyai tanggung jawab moral yang besar dalam rangka menumbuhkembangkan semangat antikorupsi, karena “sekolah adalah proses pembudayaan” (Hassan, 2004:10). Sekolah dapat menumbuhkembangkan

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi karena sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Sebagaimana pandangan Lickona (1992) bahwa penanaman karakter yang baik diperlukan tiga komponen yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Caranya, sekolah memberikan nuansa, atmosfer, dan habituasi yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk perilaku antikorupsi.

PAK di sekolah tidak diarahkan untuk melakukan gerakan praktis pemberantasan korupsi sebagaimana dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi lebih menitikberatkan usaha untuk memberikan bekal pengetahuan dasar tentang korupsi dan penyadaran urgensi sikap antikorupsi. “Peserta didik atau generasi muda diajak secara sadar membangun mental bahwa korupsi adalah penyakit yang merugikan diri sendiri, masyarakat serta masa depan bangsa dan negara” (Darmawan, 2010:3). Pembentukan pengetahuan, pemahaman berbagai bentuk korupsi, dan perubahan persepsi serta sikap terhadap korupsi mutlak dilakukan di sekolah.

PAK dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, namun tidak terkotak-kotak pada satu mata pelajaran yang berdiri sendiri (*sparated/subject matter*), tetapi terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada (*integrated*). Hal ini karena mata pelajaran pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah berat. Jika ditambah dengan mata pelajaran PAK dalam struktur kurikulum sekolah justru akan menambah beban bagi siswa. Permasalahan lain berkaitan kompetensi dan kewenangan pengajar atau guru mata pelajaran PAK. Gayut dengan kerangka

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berpikir bahwa PAK diintegrasikan dengan mata pelajaran maka salah satu mata pelajaran yang dapat disisipi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn-*Civic Education*) (Cogan;1998; Sapriya, 2007).

PKn menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Zuriah (2011:1) menyatakan bahwa “PKn menjadi salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentuk karakter bangsa”. Hal ini berarti PKn akan menanamkan nilai-nilai dan kompetensi bagi peserta didik yang berguna pada masa sekarang dan akan datang, baik menyangkut pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Pembentukan ketiga kompetensi tersebut di atas tidak mungkin terjadi secara alamiah, namun harus diusahakan secara sistematis melalui pendidikan. Untuk itu, perlu diidentifikasi, dipilih, dan ditentukan nilai-nilai yang hendak ditanamkan kepada peserta didik dalam PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn. Kestrategisan PKn sebagai transmisi antikorupsi sejalan dengan pandangan yang dipaparkan Djahiri (1995:5) dalam *Conference on Civic Education for Civil Society* yang memberikan rekomendasi tentang visi dan orientasi baru dalam pengembangan program PKn di Indonesia yaitu:

Mission and function of the Indonesian civic education should be performed as follows: political and law education is aimed to develop to student to be a good citizens and political and law literacy, namely Indonesian citizens who have a national awareness, aware of their right and duties to their government and country, understand and have strong willingness, have competencies to enforce norm and law accepted by their society, and have motivation to realize state ideals.

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara eksplisit pandangan Djahiri (1995:5) di atas tidak menyinggung tentang istilah antikorupsi sebagai salah satu visi dan orientasi PKn di Indonesia, namun secara implisit tergambar dalam tujuan yang hendak dicapai siswa, yakni menjadi warga negara yang baik, sadar hukum, sadar hak dan kewajiban, serta taat pada norma yang berlaku di masyarakat. Jika ditelisik lebih jauh sikap antikorupsi merupakan salah satu bentuk manifestasi warga negara yang baik. Pandangan lebih eksplisit disampaikan dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan *Center for Indonesian Civic Education (CICED)*, (2000: 43) bahwa “*content for the new civic education should include key concepts such as democracy, good governance, anti-corruption, the constitutional, national identity, and civic value*”. Hasil penelitian CICED memberikan penguatan urgensi wawasan antikorupsi sebagai salah satu paradigma baru isi PKn, di samping demokrasi, identitas nasional, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Kesimpulan ini didasarkan fakta empiris bahwa di Indonesia, korupsi telah begitu menggurita seperti jamur di musim penghujan yang merambah ke seluruh sektor mulai dari tingkat desa sampai dengan pemerintah pusat. Rekomendasi CICED menjadi salah satu dasar dalam pengembangan tujuan PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: “berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta **antikorupsi**” (Permendiknas No. 22 tahun 2006). Isi Permendiknas No. 22 tahun 2006 secara eksplisit menunjukkan urgensi PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam menanamkan sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu inheren dengan perikehidupan siswa saat ini dan yang akan datang. Rumusan tujuan tersebut

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

secara eksplisit tersurat tentang antikorupsi sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki siswa.

Untuk itu, jika PAK akan diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di sekolah perlu dilakukan secara “*continuum maximal* yang ditandai oleh *inclusive, activist, partisipative, process-led, value based, interative, and more difficult to archieve*” (Kerr, 1992: 6; Budimansyah, 2010:54-55). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kerr (1992) kelemahan pembelajaran nilai-moral (termasuk PKn) selama ini hanya mengarah pada “*continuum minimal* yang ditandai oleh *thin, exclusive, elitist, formal, content-led, knowledge based, didactic transmission, easier to archieve*” (Kerr, 1999: 6; Budimansyah, 2010:55).

Namun demikian PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn dengan *continuum maximal* belum cukup, masih diperlukan dukungan budaya (kultur dan iklim) sekolah terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa agar memiliki sikap dan perilaku antikorupsi. Budaya sekolah inilah dalam terminologi PKn disebut juga dengan *civic culture*. Budaya sekolah yang dapat dikembangkan dalam mendukung PAK seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, taat terhadap peraturan sekolah, konsistensi dalam penerapan aturan, adil, kerja keras, sederhana, dan lain-lain. Budaya sekolah dikembangkan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang melibatkan seluruh komponen sekolah yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi, sampai petugas kebersihan sekalipun mempunyai peran sebagai pendidik. Pentingnya melibatkan seluruh komponen sekolah dalam PAK sejalan pandangan Budimansyah (2009:20) yang menyebut istilah “*sociocultural development*, artinya pembinaan warga negara melibatkan pranata sosial yang

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berunsurkan sistem nilai dan norma dalam masyarakat”. Asumsi yang mendasari karena kewarganegaraan hidup dalam lingkungan masyarakat. Di samping itu, secara kodrat manusia tidak dapat menjadi manusia, jika tidak bergaul dan hidup bersama manusia lain sebagai bagian dari kedudukan sebagai makhluk sosial. Kerangka inilah yang menjadikan dasar bahwa upaya secara *sociocultural* menjadi sangat penting. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam masyarakat. Meminjam istilah Budimansyah (2009:21) adalah “mewujudkan orde sosial yang baik dan kondisi yang diharapkan (*desirable condition*)” melalui berbagai macam penguatan nilai-nilai baik/positif yang ada dalam masyarakat. Mengingat yang dibangun dalam gerakan sosiokultural kewarganegaraan di sekolah adalah sistem nilai dan norma antikorupsi maka perlu disediakan ruang bagi siswa agar dapat mengaktualisasikan diri dalam berbagai macam aspek kehidupannya. Pentingnya budaya sekolah dalam membentuk karakter, termasuk di dalamnya karakter antikorupsi, dikemukakan oleh Megawangi (2004:152) bahwa:

kesehatan paru-paru anak terbentuk sangat bergantung pada bagaimana mereka menghirup udara di sekelilingnya. Kalau udara yang dihirup bagus maka anak akan sehat. Begitu pula dengan pembentukan karakter anak sangat bergantung bagaimana mereka menghirup “udara moral” di sekelilingnya. Anak akan berada di sekolah sepanjang hari, apabila guru dapat memberikan udara yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan, kebajikan, penghormatan, maka karakter anak akan baik.

Pendapat Megawangi (2004) menunjukkan bahwa pendidik (kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan) menjadi model bagi siswa di sekolah. Segala upaya yang dilakukan sekolah agar siswa menjadi generasi berkarakter melalui berbagai cara layak diapresiasi. Termasuk upaya sekolah dalam mengintegrasikan PAK melalui pembelajaran PKn dan budaya sekolah. PAK

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn diharapkan “pembangunan karakter bangsa lebih kuat, mandiri, berkualitas, serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia yang bersih dan berwibawa” (Darmawan, *ad.al*, 2008: 9). Pendapat ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Brody (1994: 113-114) bahwa:

siswa *high school* yang ikut serta dalam program *We the people...* mengembangkan kepedulian yang lebih kuat terhadap keyakinan politik, sikap, dan nilai-nilai yang penting bagi berfungsinya demokrasi dibandingkan dengan kebanyakan orang dewasa dan peserta didik lainnya.

Penelitian yang dilakukan Brody (1994) memberikan gambaran bahwa siswa dianggap sebagai warga negara muda yang kelak akan menentukan nasib bangsa, sehingga eksistensinya perlu dipersiapkan dan dibelajarkan agar memiliki landasan perilaku yang kuat atau berkarakter. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Davidson dan Reesmogg, (1997:351) bahwa:

All strong societies have a strong moral basis. Any study of the history of economic development shows the case relationship between moral and economic development countries and groups that achieve successful development do so partly because they have an ethic that encourages the economic virtues of self-reliance, hard work, family and social responsibility.

Pandangan di atas memberikan gambaran bahwa moral yang kuat merupakan pondasi bagi kemajuan dan keberhasilan suatu bangsa karena selalu berpegang pada etika yang akan mendorong nilai kemandirian, kerja keras, perilaku hemat, dan jujur. Nilai-nilai tersebut pada hakekatnya merupakan inti atau komponen dasar dalam PAK di sekolah.

4. Urgensi Studi Evaluasi PAK dalam Pembelajaran PKn di Jawa Timur

Salah satu upaya dalam pencegahan korupsi dan mengembangkan sikap antikorupsi melalui sekolah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Timur pada tahun 2009, yang diawali dengan menyusun buku panduan PAK yang diberi nama Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Anti KKN). Sebagai *pilot project* ditetapkan tiga mata pelajaran yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia, serta budaya sekolah yang disisipi PAK mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2009). Pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui pendidikan didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah proses pembudayaan, sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Oleh karena itu, jika sekolah dapat memberikan semangat dan atmosfer yang sengaja diciptakan untuk mendukung internalisasi nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi, diyakini akan dapat memberikan sumbangan yang amat berarti bagi upaya menciptakan generasi bangsa yang tangguh dan berperilaku jujur kelak di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa satu dari sekian fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Perilaku antikorupsi merupakan bentuk peradaban bangsa yang bermartabat, sebaliknya korupsi merupakan tindakan merendahkan harkat sebagai bangsa.

PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di sekolah diharapkan mampu memberikan bekal dasar tentang pengetahuan, pemahaman, akibat korupsi, sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu ada dalam diri siswa. Sikap antikorupsi sebagai bentuk idealisme siswa yang akan selalu ada, sekarang dan akan datang. Bekal pengetahuan, sikap, dan perilaku antikorupsi merupakan salah

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

satu upaya untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa yang identik dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pandangan siswa yang baik dan ideal bahwa korupsi merupakan suatu bentuk pelanggaran, kelainan, penyakit, penyimpangan, dan lain-lain, sebagaimana dalam khasanah teori fungsional struktural yang disampaikan oleh Merton (Johnson, 1981) tentang anomie. Dalam rangka mengembangkan pandangan siswa yang ideal bahwa korupsi merupakan anomie diperlukan PAK di sekolah sebagai bentuk internalisasi, sosialisasi, dan pelebagaan secara sistematis yang berbasis pada “adaptasi (*Adaptation*), pencapaian tujuan (*Goal attainment*), integrasi (*Integration*), dan mempertahankan pola (*Lattent pattern maintenance/AGIL*)” (Parson, dalam Ritzer dan Goodman, 2004: 121; Ritzer, 2012: 409-410).

Rintisan PAK di sekolah formal telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku antikorupsi ke dalam: (1) materi, metode, media, dan sumber belajar pada mata pelajaran Agama, PKn, Bahasa Indonesia, (2) pengembangan berbagai bentuk kegiatan kesiswaan; (3) pembiasaan perilaku di kalangan warga sekolah. Melalui ketiga strategi tersebut diharapkan akan dapat menciptakan atmosfer dan budaya sekolah yang mendukung tumbuh dan kembangnya pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi di kalangan warga sekolah. Tujuan yang hendak dicapai dalam PAK di sekolah untuk menanamkan nilai, sikap hidup, dan mengembangkan kreativitas kebiasaan perilaku antikorupsi kepada warga sekolah. PAK di sekolah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip yang berorientasi pada pendidikan nilai dan perilaku, berjenjang dan berkesinambungan, sistematis, terpadu, dan terstruktur. Pendekatan yang digunakan dalam PAK di sekolah adalah integratif

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam mata pelajaran, integratif dalam pengembangan kegiatan kesiswaan, integratif dalam pembiasaan perilaku. Pengintegrasian ini penting agar terjadi saling mengisi, melengkapi, dan menguatkan antara pembelajaran di dalam kelas dengan di luar kelas.

Untuk melaksanakan PAK di sekolah pada tahap awal adalah melakukan identifikasi dan menyusun nilai dan perilaku antikorupsi. Langkah awal ini telah melibatkan guru pada masing-masing mata pelajaran yang dijadikan *pilot project*. Nilai dan perilaku antikorupsi ini kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menyusun silabus, kegiatan kesiswaan, dan budaya sekolah. Tahap berikutnya adalah melakukan pelatihan bagi guru-guru tentang bagaimana melaksanakan PAK melalui pembelajaran di kelas maupun di luar kelas melalui kegiatan kesiswaan dan budaya sekolah.

Namun demikian PAK melalui pembelajaran PKn dan budaya sekolah yang telah dilaksanakan selama dua tahun belum dilakukan evaluasi, baik dari sisi kompetensi, bahan bacaan, strategi pembelajaran, evaluasi, dan iklim sekolah macam apa yang mampu memberikan kontribusi dan memberikan penguat terhadap PAK di sekolah. Upaya yang selama ini dilakukan sudah barang tentu masih diperlukan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam rangka memberikan saran, masukan, perbaikan, dan mempertahankan program yang sama di masa depan. Di sinilah urgensi studi evaluatif interpretivis terhadap pelaksanaan PAK melalui pembelajaran PKn di sekolah perlu untuk dilakukan. Pemilihan studi evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditempuh dengan pertimbangan untuk menjaga agar tetap *naturalistik* yang merupakan ciri khusus dalam pendekatan kualitatif, yang “berguna untuk mengkaji implementasi

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

program pada sisi proses” (Patton, 2009: 13). Apa yang terjadi dalam program sering kali bervariasi seperti halnya perubahan kondisi, perbedaan lokasi, pelaksana di lapangan, atau hal lain yang tidak dapat diramalkan atau diantisipasi sepenuhnya. Penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif akan jauh lebih berguna dalam upaya pengembangan program, terutama dari sisi proses perencanaan dan penerapan program. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh House (1980:254-255) bahwa “kelemahan pendekatan eksperimental dalam penelitian evaluatif terlampau terfokus pada aspek validitas sehingga melupakan aspek kredibilitas dan normatif, peneliti (evaluator) selalu terlibat dengan dunia”.

Berdasarkan pandangan Patton (2009), penggunaan pendekatan kualitatif dalam studi evaluasi diharapkan dapat mengungkap “makna”, yang merupakan salah satu karakteristik pokok penelitian kualitatif. Penelitian naturalistik “tidak peduli terhadap persamaan objek penelitian melainkan mengungkap tentang pandangan kehidupan dari orang-orang yang berbeda” (Sapriya, 2007: 131; Daniah dan Wasriah, 2009:60). Penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan memperoleh gambaran yang bersifat alamiah pula. Tujuan lain dalam studi ini untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang PAK di sekolah dan mengembangkan perangkat PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKN di sekolah sebagai upaya peningkatan pemahaman siswa tentang antikorupsi, sekaligus pembinaan watak atau karakter bangsa (*nation and character building*).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga fokus yang menjadi kajian, *Pertama*, pandangan (persepsi, pengetahuan, pengalaman, dan sikap) kepala sekolah, guru

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

PKn, dan siswa SMP sebagai subjek terfokus tentang korupsi dan PAK baik dalam pembelajaran PKn maupun melalui kultur sekolah dalam rangka penguat karakter. *Kedua*, upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai tahap identifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sampai pada tahap implementasi di kelas. *Ketiga*, upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam rangka mengembangkan habituasi yang diwujudkan dalam budaya sekolah yang diprediksi mampu memberikan dukungan pada PAK yang telah dilakukan dalam pembelajaran PKn.

Fokus masalah yang telah dipaparkan di atas kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian evaluasi yaitu ***bagaimana kerangka konseptual-teoritis dan implementatif PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn sebagai penguat karakter bangsa?*** Secara terperinci pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pandangan kepala sekolah, guru PKn, dan siswa tentang korupsi serta pendidikan antikorupsi di sekolah?
2. Bagaimana guru menyusun dan mengembangkan tujuan, memilih dan mengembangkan bahan ajar, memilih dan menentukan metode, media, dan teknik asesmen PAK yang diintegrasikan melalui pembelajaran PKn yang ada dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas VIII semester gasal?
3. Bagaimana pelaksanaan PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di kelas VIII semester gasal, menyangkut interaksi guru-siswa, siswa-siswa, dan siswa dengan lingkungan?

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Bagaimana menghabituisikan nilai-nilai antikorupsi yang diwujudkan dalam bentuk budaya sekolah yang diprediksi mampu memberikan dukungan PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn?
5. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di kelas VIII sebagai penguat karakter siswa SMP?
6. Bagaimana Efektivitas PAKEM dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di SMP?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menemukan ide-ide dasar kerangka konseptual-teoritis dan implementatif PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn sebagai penguat pembinaan karakter bangsa. Secara terperinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji pandangan kepala sekolah, guru PKn, dan siswa tentang korupsi serta PAK di sekolah.
2. Untuk mengkaji tujuan, bahan ajar, metode, media, dan teknik asesmen PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn, dituangkan dalam RPP yang dikembangkan guru di kelas VIII semester gasal.
3. Untuk mengkaji pelaksanaan PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di kelas VIII semester gasal, yang menyangkut interaksi guru-siswa, siswa-siswa, dan siswa dengan lingkungan.
4. Untuk menggali, mengkaji, dan menemukan cara menghabituisikan nilai-nilai antikorupsi dalam bentuk budaya sekolah yang diprediksi mampu memberikan dukungan PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn.

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5. Untuk menggali, mengkaji, dan menemukan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di kelas VIII sebagai penguat karakter siswa SMP.
6. Untuk mengetahui Efektivitas PAKEM dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di SMP.

D. Manfaat Penelitian

Secara *teoritis* melalui penelitian evaluasi ini akan memberikan sumbangan dalam:

- a. Pengembangan konseptual-metodologis penelitian evaluasi kualitatif dengan pendekatan interpretivis khususnya dalam bidang PKn.
- b. Penguatan konseptual-teoritis tentang pendidikan karakter bangsa dan pengembangan keilmuan PKn.
- c. Penguatan konseptual-teoritis tentang perencanaan pembelajaran PKn di sekolah sebagai salah satu pilar dalam pendidikan karakter bangsa.
- d. Penguatan konseptual-teoritis tentang perkembangan moral siswa SMP.
- e. Penguatan konseptual-teoritis tentang pelaksanaan pembelajaran PKn dalam rangka mendukung PAK sebagai salah satu pilar dalam pendidikan karakter bangsa.

Secara *praktis* studi evaluasi PAK melalui pembelajaran PKn di sekolah, diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Pengambil kebijakan, terutama berkaitan dengan PKn dan PAK di sekolah dalam upaya mempersiapkan warga negara yang cerdas baik secara intelektual,

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

emosional, dan sosial dalam rangka mengembangkan sikap, keterampilan, serta perilaku antikorupsi.

- b. Para akademisi atau komunitas yang menaruh perhatian besar pada bidang PKn sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan PAK sebagai bagian dari kajian teoritik dan empiris dalam pembelajaran PKn di sekolah dan di masyarakat.
- c. Para pengembang kurikulum di semua jenis dan jenjang pendidikan dalam melakukan pengintegrasian PAK ke dalam berbagai mata pelajaran.
- d. Para praktisi PKn khususnya pada jenjang SMP dalam melakukan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi PAK yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran PKn.
- e. Siswa akan memperoleh pengalaman belajar tentang pentingnya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan bersama, sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran pentingnya memelihara sikap jujur dalam setiap aktivitas sebagai bagian dari PAK.
- f. Meningkatkan wawasan, cara berfikir, serta pengetahuan guru dan siswa berbagai dampak negatif korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Pengertian Istilah

1. Pendidikan Antikorupsi (PAK) adalah pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan watak antikorupsi dalam diri siswa yang dilakukan dalam lingkup sekolah formal. Dalam konteks ini PAK diintegrasikan dalam pembelajaran PKn tanpa membuat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) baru.

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education* umumnya merujuk pada jenis mata pelajaran yang diselenggarakan dalam struktur kurikulum sekolah formal dengan berbagai macam isi (Cogan, 1998; Sapriya, 2007). Pandangan yang hampir mirip disampaikan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007) bahwa mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat kelak setelah mereka dewasa. PKN yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah merujuk pada mata pelajaran yang diselenggarakan dalam struktur kurikulum di sekolah. PKN di sekolah dimaksudkan untuk peningkatan wawasan dan kesadaran siswa akan status, kewajiban, dan hak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas diri sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Permendiknas Nomor 22 tahun 2006).
3. Karakter Bangsa Indonesia adalah perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang menentukan kesadaran, pemahaman, rasa, dan karsa, serta perilaku berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengakui keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Budimansyah, 2010).

4. Studi evaluasi merupakan aktivitas untuk menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program baik dari sisi teoritis maupun praktis (Patton, 2009:30).
5. Metode interpretivis merupakan salah satu “metode evaluasi penelitian kualitatif yang selalu berhubungan dengan kontekstualisasi makna dan realitas sosial yang selalu dikonstruksi secara sosial pula” (Denzin dan Lincoln, 2009:704) berdasarkan atas “interpretasi dan reinterpretasi secara konstan dari semua intensional, perilaku manusia yang bermakna, termasuk perilaku peneliti” (Smit, 1989:85).
6. PAKEM adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Kreatif adalah menciptakan kegiatan pembelajaran yang memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Efektif merujuk pada aktivitas pembelajaran yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menyenangkan merupakan suasana pembelajaran yang membuat siswa merasa bergembira sehingga waktu curah perhatian secara penuh untuk belajar (Sudrajat, 2008; Suparlan *et al*, 2005).

F. Struktur Organisasi Disertasi

Struktur penulisan disertasi ini terdiri atas lima (5) bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II landasan teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab V kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi.

Bab I berisi latar belakang yang memberikan konteks pentingnya masalah untuk diteliti, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, dan struktur organisasi disertasi.

Harmanto, 2013

Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi Dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM Di SMP)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab II disajikan tentang landasan konsep dan teori yang berisi deskripsi, pengelompokkan, analisis, dan pandangan penulis tentang: PAK dalam perspektif filsafat pendidikan idealisme, perenialisme, dan rekonstruksionisme, urgensi PAK dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, konsep dasar korupsi, belajar dan pembelajaran PKn, teori perkembangan moral, pendidikan antikorupsi sebagai penguat pendidikan karakter bangsa, PAK di Jawa Timur, hasil penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

Bab III diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, instrumen, peran peneliti, dan keabsahan data, informan/subjek, sumber data, dan teknik pengambilan subjek penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan pandangan kepala sekolah, guru PKn, siswa tentang korupsi dan PAK, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran PAK yang diintegrasikan dalam PKn, pelaksanaan PAK yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn di kelas VIII semester gasal, habituasi di sekolah yang mendukung PAK, faktor-faktor yang mendukung pembinaan karakter siswa SMP melalui PAK di sekolah, pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PAK yang diintegrasikan melalui PKn sebagai upaya memperkuat karakter bangsa.

Bab V berisi kesimpulan tentang PAK dalam pembelajaran PKn sebagai penguat karakter bangsa, implikasi, dan rekomendasi.